



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HADRAWATI
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 93548

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.720.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/265 m2 di KOTA MAKASSAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 225 m2 di MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 150 m2 di KOTA PANGKEP, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 160 m2 di KOTA PANGKEP, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/55 m2 di KOTA PANGKEP, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 350 m2 di GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/136 m2 di KOTA MAKASSAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 120.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. ----

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	3.915.000.000
III. HUTANG	Rp.	1.521.600.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.393.400.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.